



Balai Pelestarian
Nilai Budaya Pontianak

STAIN PONTIANAK
DPRESS

SISTEM PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK 1771 - 1945

ASNAINI

Direktorat
dayaan



951
ASN
S

SISTEM PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK 1771 - 1945

Asnaini



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan
SISTEM PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK 1771 - 1945
@ 2013, Indonesia: Pontianak

Cover :
Fahmi Ichwan

Designer/Lay Out
Muhamad Tisna Nugraha

Publishing
STAIN Pontianak Press
bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

STAIN Pontianak Press
Jl. Letjend Soepranto No. 19 pontianak 78121
Tel./Fax. (0561) 734170

Cetakan Pertama, Desember 2013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Asnaini
**SISTEM PEMERINTAHAN KOTA
PONTIANAK 1771 - 1945**
Pontianak: STAIN Pontianak Press, 08
Desember 2013
viii + 60 Page. 16 cm x 24 cm

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat dari Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang bertemakan Sistem Pemerintahan Kota Pontianak 1771 – 1945 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan sejarah kota ini merupakan salah satu upaya untuk mengungkapkan dan mengumpulkan tulisan tentang pemerintahan Kota Pontianak sejak berdirinya menjadi sebuah kerajaan hingga menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat Pontianak tentang sejarah Kota Pontianak itu sendiri.

Dalam kesempatan ini penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Drs. Salmon Batuallo, selaku Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak yang telah memberikan arahan dalam penelitian ini.
2. Bapak Ikhsan, S.Sos selaku Kasubbag Tata Usaha yang telah memberikan pandangan dalam penulisan ini.
3. Bapak, Ibu yang telah memberikan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik yang diteliti.
4. Penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus kepada para informan dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas semua bantuan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis, maka kami tidak menutup diri untuk menerima masukan untuk perbaikan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran dan

masukannya yang bersifat membangun demi sempurnanya tulisan ini. Akhirnya, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya tulisan sejarah Kota Pontianak.

Pontianak, Desember 2013

Penulis

ABSTRAK

Kota Pontianak adalah sebuah negeri yang didirikan oleh Sultan Sy. Abdurrahman pada 23 Oktober 1771 dan menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Pontianak hingga saat ini.

Sebelumnya wilayah Pontianak ini adalah wilayah kosong yang dihuni oleh perompak yang mengganggu aktivitas pelayaran dan perdagangan di wilayah tersebut. Selain itu Pontianak merupakan sebuah kerajaan yang mengalami masa penjajahan Hindia Belanda dan Pendudukan Jepang, sebagaimana dialami juga oleh rakyat Indonesia pada umumnya.

Berbagai penderitaan dan kebebasan hak sultan untuk memimpin rakyatnya dirampas oleh penjajah. Sultan tunduk dengan aturan yang dikeluarkan oleh penjajah dengan diterbitkannya berbagai perjanjian yang menguntungkan pihak penjajah.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
1.5 Ruang Lingkup	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.7 Tinjauan Pustaka	8
1.8 Sistematika Penulisan	11
 BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK	
2. 1 Pontianak di Masa Kerajaan	19
2.2 Pontianak Masa Penjajahan Belanda	30
2.3 Masa Pendudukan Jepang	38
 BAB 3 PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN	41
 BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	53
 DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai ibukota provinsi, Kota Pontianak senantiasa terus membangun kotanya baik infrastruktur maupun pembangunan di berbagai aspek kehidupan lainnya.

Pembangunan di dalam bidang infrastruktur, telah dibangun pelebaran jalan walaupun sekarang ini masih dirasakan oleh masyarakat belum maksimal karena mobilitas pertumbuhan angka kendaraan bermotor semakin meningkat sementara tidak diikuti perkembangan pembangunan jalan sehingga membuat arus lalu lintas menjadi macet pada ruas jalan tertentu dan jam-jam tertentu pula. Hal ini juga disebabkan karena jalan alternatif yang terbatas sehingga

kendaraan-kendaraan tersebut tertumpah pada ruas jalan utama saja.

Dalam kehidupan sosial budaya, misalnya sudah banyak didirikan lembaga pendidikan untuk membentuk kualitas sumber daya manusia di Kota Pontianak. Dengan bekal pendidikan diharapkan masyarakat Kota Pontianak pada khususnya dan umumnya masyarakat Kalimantan Barat diharapkan dapat meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dalam rangka mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia yaitu untuk mencerdaskan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berkaitan dengan demografinya, Kota Pontianak tergolong dalam katagori kota yang heterogen, berbagai suku yang bermukim di wilayah ini dan turut berperan pula dalam membangun kota Pontianak. Selain Melayu dan Dayak yang dikatakan sebagai penduduk asli, etnis Tionghoa dan etnis-etnis lain banyak juga yang bermukim di Kota Pontianak seperti Bugis, Jawa, Madura, Bali, Batak, dan hampir suku-suku yang ada di Indonesia juga telah menjadi warga Kota Pontianak pada khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Mereka turut pula membangun Kota Pontianak seperti keberadaan Kota Pontianak sekarang ini. Berkembangnya Kota Pontianak merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan seluruh masyarakat yang bermukim di kota ini.

Pontianak adalah sebuah kota dan menjadi ibukota dari Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini dan secara administratif termasuk dalam wilayah provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah negeri yang tergabung dalam NKRI, tentu mengalami fase-fase atau proses perubahan dalam sistem pemerintahannya hingga Kota Pontianak tersebut sekarang sudah menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Barat.

Kota Pontianak, sebelumnya telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan dalam sistem pemerintahannya. Sejak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak merupakan sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Pontianak. Sebagai pendiri Kerajaan Pontianak, maka Sultan Syarif Abdurrahman dinobatkan sebagai raja dari kerajaan tersebut.

Dalam masa pemerintahan kerajaan, Pontianak juga dikuasai oleh bangsa Kolonial Belanda yang menduduki seluruh wilayah nusantara ini tidak terkecuali kerajaan Pontianak pun termasuk wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Sebagai wilayah jajahan Kolonial Belanda, sistem pemerintahannya pun mengikuti negara yang menjajahnya. Demikian juga pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pun demikian juga halnya, memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan Pontianak juga mengalami hal yang serupa.

Sistem pemerintahan di Indonesia memang banyak mengalami perubahan menjelang kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pun banyak pula permasalahan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan Barat dan Kota Pontianak, sebagai kota yang termasuk dalam wilayah Kalimantan Barat. Gonjang ganjing politik pada masa itu memberikan dampak yang besar dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga di Kalimantan Barat pun pernah dijadikan sebagai Daerah Istimewa Kalimantan Barat

Tulisan-tulisan sejarah lokal yang berkaitan dengan Kota Pontianak ini banyak yang telah ditulis, dan yang berkenaan dengan sistem pemerintahan inipun juga telah ditulis namun masih dalam bentuk tulisan yang bersifat partial. Tulisan-tulisan itu tidak terhimpun secara utuh. Oleh karena itu kami memandang perlu untuk menghimpun tulisan-tulisan yang berkenaan sistem pemerintah Kota Pontianak dari masa kerajaan hingga menjelang kemerdekaan Indonesia dalam satu tulisan sejarah yang utuh.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dari topik yang diangkat dalam sebuah penelitian, harus dirumuskan dengan baik dan sesuai dengan topik tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang penelitian ini maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana sistem pemerintahan Kota Pontianak pada masa kerajaan ?
2. Bagaimana sistem pemerintahan Kota Pontianak pada masa penjajahan Belanda ?
3. Bagaimana sistem pemerintahan Kota Pontianak pada masa pendudukan Jepang ?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun data partial dalam beberapa buku sejarah lokal Kota Pontianak, serta mengumpulkan data dan informasi tentang sistem pemerintahan tersebut. Kemudian menganalisa tulisan yang ada dan pada akhirnya didokumentasikan dalam tulisan sejarah lokal yang dapat dipergunakan sebagai bahan ajar di sekolah secara utuh tentang sistem pemerintahan Kota Pontianak tersebut.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menghimpun tulisan tentang sejarah sistem pemerintahan Kota Pontianak yang selama ini ditulis secara partial.
2. Mendokumentasikan sejarah lokal tersebut sebagai bahan muatan lokal yang dapat dijadikan bahan ajar di sekolah-sekolah.

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti atau masyarakat umum.
4. Sebagai bahan referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

1.5 Ruang Lingkup

Dalam penulisan ini dibatasi dengan ruang lingkup *spasial*, *temporal* dan pendekatan sejarah sosial. Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Kota Pontianak. Sedangkan lingkup temporalnya dapat dilihat pada periodisasi keberadaan Kota Pontianak ini.

Menurut Hariyono (1995 : 64) bahwa secara umum periodisasi sejarah Indonesia yang banyak digunakan adalah zaman prasejarah, zaman Hindu Budha, zaman Islam, zaman kolonial, zaman pendudukan Jepang, zaman revolusi kemerdekaan, zaman orde lama dan zaman orde baru. Sudah barang tentu pembagian tersebut bukan peristiwa yang terputus begitu saja. Aspek kelangsungan, suatu kontinuitas juga masih nampak.¹ Dengan melihat periodisasi tersebut, maka ruang lingkup temporal dalam tulisan ini dibatasi pada Pontianak pada masa kerajaan hingga pada masa kemerdekaan Indonesia dalam masa kerajaan tersebut, kota Pontianak sebagai wilayah jajahan Belanda dan Jepang tentu mengalami perubahan dalam sistem pemerintahannya.

¹ Hariyono, Drs. M.Pd, 1995, Mempelajari Sejarah secara Efektif, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode sejarah dengan upaya mencari dan menemukan data dari berbagai sumber, baik yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas maupun hasil wawancara dan penelitian lapangan akan tertuang dalam sebuah penulisan sejarah (historiografi). Data dalam bentuk tulisan yang secara partial, dihimpun dalam satu tulisan yang utuh tentang sistem pemerintahan di Kota Pontianak.

Menurut Notosusanto bahwa proses metode sejarah ada 4 tahap yaitu heuristic yang berarti proses mencari untuk menemukan sumber-sumber, kemudian kritik sumber baik ekstern maupun intern dengan menguji sumber-sumber, interpretasi atau penafsiran dan terakhir adalah historiografi itu sendiri yaitu penulisan sejarah dengan merangkai fakta-fakta menjadi kisah sejarah.² (Selain Nugroho, Menurut Muhammad Arif dalam Bukunya Pengantar Kajian Sejarah) juga mengemukakan metode yang sama, dengan juga dengan Suhartono W. Pranoto dengan istilah yang sama pula hanya pada tahap interpretasi tetapi beliau menyebutkan dengan istilah eksplanasi tahun terbitan 2011 dan 2011) dan lebih terbaru.

² Nugroho Notosusanto, 1978, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*, Yayasan Idayu- Jakarta

Menurut Kuntowijoyo bahwa metodologi sejarah antara lain Sejarah Sosial, Sejarah Lisan, Sejarah Kota, Sejarah Pedesaan, Ekonomi Pedesaan, Kebudayaan, Wanita, Agama, Politik, Pemikiran, Biografi, Kuantitatif dan Sejarah Mentalitas, Metodologi Sejarah³. Dalam penulisan ini juga tidak terlepas dengan penggunaan ilmu bantu dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang ada dan kemudian dilakukan analisis sehingga menjadi sebuah karya historiografi dengan dukungan data yang baru untuk melengkapi tulisan-tulisan yang telah ditulis secara terpisah.

1.7 Tinjauan Pustaka

Tulisan ini sebagaimana judul di atas bahwa akan mengisahkan tentang sistem pemerintahan Kota Pontianak dari masa Kerajaan hingga pada periode kemerdekaan Indonesia dimana Kota Pontianak secara khusus dan umumnya Kalimantan Barat juga mengalami masa kemerdekaan itu sebagai wilayah kepulauan di nusantara ini. Dalam masa kerajaan ini, Pontianak adalah sebuah negeri yang termasuk dalam wilayah yang dijajah oleh Belanda. Oleh karena yang dibahas adalah mengenai kejadian masa lalu yang kemudian dikonstruksi ulang dalam sebuah tulisan, maka dapat digolongkan sebagai tulisan sejarah sebagaimana

³ Kuntowijoyo, Edisi Kedua, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2003.

yang dikemukakan oleh Hariyono (1995 : 132)⁴ bahwa penulisan sejarah merupakan hasil laporan suatu kejadian. Pelbagai dokumen tangan pertama merupakan sumber utama sejarah. Kemudian sampai pada usaha mengumpulkan dan mensistematisir laporan dalam kronik dan buku tahunan, diikuti oleh pelbagai bukti dan artikel yang ditulis berdasarkan penelitian yang intensif dalam sumber primer.

Ada beberapa tulisan yang serupa dapat dijadikan model penulisan ini seperti :

1. Salatiga, Sketsa Kota Lama yang ditulis oleh Eddy Supangat. Dalam buku ini menggambarkan atau mengisahkan peristiwa sejarah masa lalu namun yang dibahasnya adalah kilas balik pemerintahan Tempo dulu dimana Salatiga itu pernah menjadi kota militer, kota terindah di Jawa Tengah, Kota Praja terkecil di Indonesia, pembangunan berbagai fasilitas, kawasan permukiman, *kerkehof*, perekonomian, kesehatan, dan setelah Indonesia merdeka. Kilas balik transportasi tempo dulu, bangunan-bangunan yang penuh kenangan, peninggalan masa lalu, Salatiga dan orang-orang ternama serta Salatiga dalam Lensa.
2. Kesultanan Pontianak, yang disusun oleh Ir. Muhammad Hidayat merupakan sebuah tulisan lapran sejarah

⁴ Hariyono, Drs. M.Pd, 1995, Mempelajari Sejarah secara Efektif, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta

Kesultanan Kadriah itu sendiri yang berbentuk kumpulan Keraton-Keraton Nusantara yang mengisahkan tentang sejarah Kesultanan Pontianak dengan lebih memfokuskan pada arsitektur bangunan keraton tetapi di dalamnya juga dibahas tentang sejarah Kesultanan Pontianak.

3. Dana Listiana, dalam tulisannya Tokoh, Peristiwa, dan Tempat Bersejarah di Pontianak – Kubu – Mempawah sejak Masa Kesultanan hingga Masa Republik, merupakan kumpulan tulisan atau bunga rampai yang tertuang dalam buku Nukilan Sejarah Kalimantan Barat. Tulisan ini mengisahkan tentang sultan-sultan Pontianak, tempat dan peristiwa yang bersejarah di Kota Pontianak.
4. Selanjutnya buku Ibukota Pontianak 1779 – 1942 (Lahir dan Berkembangnya Sebuah Kota Kolonial) oleh Dana Listiana yang menggambarkan cikal bakal Kota Kolonial 1771 - 1819, keadaan Pontianak menuju Kota Kolonial 1819 – 1919, dan Kota kolonial Pontianak tahun 1919 – 1942.
5. Kemudian tulisan terakhir adalah Pemerintahan Kota Pontianak dari Masa ke Masa. Dalam tulisan ini dibahas tentang sejarah Kota Pontianak dalam berbagai aspek kehidupan seperti pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial budaya sejak dari masa pemerintahan tradisional hingga 2002 dimana telah dilaksanakannya Undang-undang Otonomi daerah.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil yang lebih sistematis maka hasil penelitian ini akan disusun dalam sebuah sistematika sebagai berikut :

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Masalah
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Manfaat
- 1.5 Ruang Lingkup
- 1.6 Metode Penelitian
- 1.7 Tinjauan Pustaka
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II SISTEM PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK

- 2.1 Pontianak Masa Kerajaan
- 2.2 Pontianak Masa Penjajahan Belanda
- 2.3 Pontianak Masa Pendudukan Jepang

**BAB III PERUBAHAN SISTEM
PEMERINTAHAN**

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran



Sistem Pemerintahan Kota Pontianak

Sebelum membahas lebih lanjut sistem pemerintahan Kota Pontianak, maka perlu dipaparkan terlebih dahulu lahirnya kerajaan Pontianak yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Kota Pontianak sebelumnya adalah wilayah kosong. Perjalanan Sy. Abdurrahman untuk mencari wilayah atau membangun negeri yang baru, sampai ditemukannya wilayah tersebut.

Dengan ditemukannya wilayah yang baru itu, maka Sy. Abdurrahman beserta rombongan mendirikan sebuah negeri. Hal pertama dibangunnya pada saat itu adalah sebuah masjid di pinggiran sungai. Sungai merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat pada masa itu. Selain untuk keperluan MCK, sungai mempunyai peranan penting bagi kehidupan perekonomian, sosial budaya, pertahanan

keamanan, dan sungai merupakan urat nadi bagi kehidupan mereka.

Pontianak adalah sebuah kota yang secara administratif termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat sekaligus merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak terdiri atas 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Selatan, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara. Pontianak Tenggara merupakan kecamatan termuda dan hasil pemekaran dari Kecamatan Pontianak Selatan sedangkan Pontianak Kota ini merupakan hasil dari Kecamatan Pontianak Barat. Masing-masing kecamatan ini dikepalai oleh seorang camat dan secara administratif semua kecamatan ini termasuk dalam wilayah Kota Pontianak.

Dilihat dari perkembangan kotanya, kota ini dibangun oleh masyarakat Kota Pontianak secara khususnya dan umumnya masyarakat Kalimantan Barat yang telah lama menetap di kota itu. Masyarakat Kota Pontianak ini merupakan masyarakat yang heterogen, dan mereka telah berperan dalam perkembangan kota ini hingga seperti yang ada sekarang ini.

Kota Pontianak yang memiliki luas wilayah daratan dan perairan yang begitu luas serta dihuni oleh berbagai lapisan masyarakat dari berbagai etnis yaang di nusantara ini. Dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan dampak yang berarti bagi pertumbuhan dan

perkembangan kota Pontianak ini. pertumbuhan angka penduduk ini tidak hanya diperoleh dari angka kelahiran saja tetapi didukung pula dengan angka perpindahan penduduk ke kota ini semakin meningkatkan pertumbuhan penduduk.

Kehadiran para pendatang itu berasal dari berbagai wilayah di nusantara dan menetap di kota Pontianak turut pula memberikan corak perubahan pada segala aspek kehidupan masyarakat di kota ini. Mereka terdiri dari berbagai etnis msalnya Jawa, Bugis, Madura, Sunda, Padang, Aceh, Batak dan sebagainya.

Sedang penduduk asli yang menetap di Kota Pontianak ini adalah etnis Melayu, Dayak dan Tionghoa. Tionghoa ini juga merupakan kaum migran atau pendatang sejak masa dahulu. Mereka berdatangan dari daratan Tiongkong melalaui Singapura dan diperkerjakan sebagai buruh tambang emas yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini. Kehadiran pendatang dari etnis Tionghoa ini memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan perekonomian di Pontianak.

Kehadiran kaum pendatang ini memberikan perubahan corak pada aspek sosial ekonomi saja tetapi sosial budaya dan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat lainnya pun turut mendapatkan pengaruh dan perkembangan sebagai akibat terjalin interaksi di antara mereka, antara kaum pendatang dan masyarakat setempat.

Berbagai lapangan pekerjaan tercipta dengan kehadiran para pendatang itu. Mereka melakukan program perpindahan penduduk ini dengan cara yang berbeda. Ada yang mengikuti program kerja pemerintah yaitu melalui program transmigrasi, atau melalui jalur mandiri. Sejak dahulu program ini sudah ada namun dengan nama dan istilah yang berbeda. Perpindahan penduduk khususnya dari pulau Jawa dalam sejarah perkembangannya telah dimulai awal abad XX yaitu masa Kolonial Belanda. Perpindahan penduduk yang dilaksanakan di masa itu selain didalam usaha untuk mengatasi kepadatan penduduk juga diutamakan untuk kebutuhan mencari tenaga kerja yang murah guna dipekerjakan di perkebunan Belanda di luar Jawa. Usaha perpindahan penduduk di masa itu dikenal dengan sebutan kolonisasi yaitu dengan menempatkan petani-petani dari Jawa ke desa-desa baru di luar Jawa. Penempatan petani dengan kolonisasi ini dimulai pada tahun 1905 dengan pemindahan 155 keluarga petani dari daerah Kedu menuju Gedongtataan di Karesidenan Lampung.

Kolonisasi yang dimulai sejak tahun 1905 berlangsung selama $\pm$ 37 tahun hingga tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka, masalah kolonisasi ini mendapat perhatian. Dalam tahun 1947 masalah kolonisasi atau pemindahan rakyat dicantumkan sebagai salah satu tugas Kementerian Perburuhan dan Sosial. Pada tahun 1948 tugas kolonisasi dialihkan ke Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

Nama kolonisasi pun diganti menjadi transmigrasi. (Dahlan dalam Asnaini, 2010 : 1)

Dengan demikian penambahan angka penduduk tidak hanya disebabkan dengan jumlah penambahan angka kelahiran tetapi dengan perpindahan penduduk seperti ini juga menambah jumlah angka penduduk di luar pulau Jawa. Sejak dahulu pulau Jawa sudah terkenal dengan jumlah penduduk yang padat dan penyebarannya pun tidak merata sehingga pemerintah Belanda memandang perlu untuk menangani penyebaran tenaga kerja di seluruh negeri ini karena masih dalam lingkup negeri jajahannya.

Sampai saat ini program tranmigrasi ini tetap dijalankan pemerintah dalam rangka pemerataan jumlah penduduk di seluruh Indonesia agar kepadatan penduduk tidak bertumpu pada satu wilayah tertentu saja.

Program transmigrasi ini juga merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyatnya sebagaimana tercakup dalam peraturan perundang-undangan tentang transmigrasi.

Dalam UU nomor 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi pada Bab II tentang Kebijakanaksanaan Umum Transmigrasi, pasal 2 disebutkan bahwa sasaran kebijakanaksanaan umum transmigrasi ditujukan kepada terlaksanakannya transmigrasi swakarsa (spontan) yang diatur dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk mencapai :

1. Peningkatan taraf hidup;
2. Pembangunan daerah;
3. Keseimbangan penyebaran penduduk;
4. Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia;
5. Pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia;
6. Kesatuan dan kesatuan bangsa;
7. Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Program transmigrasi ini pula yang turut meningkatkan jumlah penduduk di Kota Pontianak yang telah memberikan dampak positif dalam pemerataan jumlah penduduk di kota ini. Dengan jumlah penduduk yang meningkat memberikan kesempatan penduduk untuk membangun kota Pontianak. Dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak didukung dengan jumlah penduduk dan sumber daya manusia yang handal tidak mungkin dapat mengantarkan pertumbuhan dan perkembangan kota Pontianak seperti sekarang ini.

Namun jauh daripada itu, peran pemerintah di masa lalu juga memberikan arti penting dalam perkembangan kota ini dengan kebijakan yang telah diambilnya yang tertuang dalam program-program yang telah dilaksanakannya dan lebih lanjut akan dipaparkan sistem pemerintah Kota Pontianak yang tentu erat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan untuk menopang pertumbuhan dan

perkembangan wilayah kota pada umumnya dan Kota Pontianak pada khususnya.

2. 1 Pontianak di Masa Kerajaan

Pertumbuhan dan perkembangan kota Pontianak tidak terlepas dari sejarah berdirinya kota ini. Perkembangan kota Pontianak ini terdiri dari berbagai babakan atau periodisasi seperti pada masa berdirinya sebuah kerajaan atau pemerintahan tradisional, masa pemerintahan kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang di Indonesia secara umum, juga dialami oleh Pontianak yang termasuk dalam salah satu wilayah di nusantara ini.

Menurut sejarahnya Pontianak ini merupakan wilayah kosong yang banyak dihuni para perompak. Jauh sebelum menjadi Kota Pontianak, Pontianak ini adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman. Pada masa itu antara satu kerajaan dengan kerajaan lain di nusantara ini sudah terjalin hubungan, baik itu perdagangan maupun syiar agama. Dalam rangka itulah perkembangan wilayah kerajaan yang telah dibangun di sepanjang aliran sungai ini maju dan berkembang pesat. Hal ini sering menjadi tempat persinggahan para pedagang dan penyiar agama di wilayah perairan di seluruh nusantara. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia.

Sebelum kerajaan Pontianak berdiri, tersebutlah Syarif Abdurrahman, seorang putera dari penyiar agama Islam yang

berasal dari Trim Hadrilmaut, Yaman Selatan yaitu Habib Husein Al Kadri. Beliau bersama teman-temannya Al Sayyid Umar Al Saggaf, Al Sayyid Abubakar Al Idrus, dan Al Sayyid Muhammad bin Achmad Quraissy berlayar menuju wilayah ini. Mereka meninggalkan tempat kelahirannya untuk memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam. Kehadiran mereka tidak saja memberikan arti penting dalam sejarah perjalanan terbentuknya Kerajaan Pontianak, tetapi juga Kerajaan Mempawah dan Kerajaan Matan pada masa itu. Perjalanan yang panjang yang dilakukan oleh Habib Husein sebelum tiba di negeri Matan dan Mempawah. Kilas balik perjalanannya perlu untuk diungkap untuk memberikan gambaran sebuah periodisasi terbentuknya Kota Pontianak bukanlah perjalanan yang mudah yang dapat menjadi teladan bagi generasi sekarang ini untuk menelusuri jejak-jejak para pendahulu untuk mempersatukan wilayah di negeri ini melalui pendekatan agama.

Tujuan utama dari pengembaraannya adalah Negeri Aceh. Pada masa itu Aceh dikenal sebagai tempat imigrasinya bangsa Arab. Sebelumnya mereka beberapa kali singgah, mereka singgah di Terengganu -- Negara Bagian Malaysia -- dan salah seorang dari mereka memilih untuk menetap di wilayah ini yaitu Al Sayyid Muhammad bin Achmad Quraissy. Lalu kemudian mereka melanjutkan kembali pengembaraannya tanpa diikuti oleh temannya yang ingin menetap di Terengganu tersebut. Bertiga mereka

melanjutkan pengembaraannya ke Aceh. Namun yang menetap di Aceh adalah Habib Husein dan Al Sayyid Abubakar sedangkan Sayyid Umar Al Saggaf melanjutkan perjalanan menuju Siak.

Setelah lama menetap di Aceh kemudian Habib Husein melanjutkan perjalanan ke Batavia dan Semarang. Pada saat itu antara Semarang dan Matan telah terjalin kerjasama perdagangan. Di Semarang ini, Habib Husein bertemu Syech Salim Hambal yang kemudian menjadi muridnya. Bersama muridnya itu Habib Husein mengembara ke Matan pada tahun 1735. Mereka diterima dengan baik oleh Raja Matan yang pada saat itu dipangku oleh Sultan Muhammad Zainuddin, dan Raja Matan kemudian mengangkat Habib Husein sebagai mufti atau penghulu agung kerajaan menggantikan kedudukan Sayyid Hasyim. Beliau bertugas tidak saja mengurus hal-hal yang berkenaan agama, masalah-masalah sosial dan politik pun menjadi tugas dan tanggung jawabnya yang dipercayakan oleh sultan kepadanya.

Lama menetap di Kerajaan Matan, beliau menikah dengan dayang-dayang dari suku Dayak yaitu Puteri Nyai Tua, yang telah memeluk agama Islam. Pada saat terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan atas perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Nakhoda Achmad dengan seorang gadis Matan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, demi menjaga

keluarganya dan agar Sultan tidak tersinggung, kemudian beliau memohon izin untuk melanjutkan kembali perjalanannya ke Mempawah diantar dengan tiga buah perahu Kerajaan Matan di Kerajaan Mempawah disambut baik oleh Opu Daeng Manambon. Mereka sekeluarga diantar dan dijemput dengan upacara kebesaran dari masing-masing kerajaan. Di Kerajaan Mempawah Habib Husein dijemput dengan dua buah perahu yang dipimpin oleh putera Raja Mempawah, Gusti Haji Gelar Pangeran Mangku.

Di Kerajaan Mempawah ini beliau diangkat menjadi mufti dan patih Kerajaan Mempawah. Selama lima belas tahun beliau menetap di Mempawah dan wafat pada tanggal 3 Zulhijjah 1184 H (1770), dimakamkan di Sejegi Mempawah.

Dari perkawinan tersebut lahirlah empat orang anak yaitu anak sulungnya bernama Syarifah Khadijah, Syarif Abdurrahman, adalah anak keduanya, anak ketiganya adalah Syarifah Mariyam dan anak keempat adalah Syarif Alwie. Putera kedua beliau yaitu Syarif Abdurrahman inilah yang merupakan pendiri Kerajaan Pontianak, dan Kerajaan Pontianak ini merupakan cikal bakal Kota Pontianak.

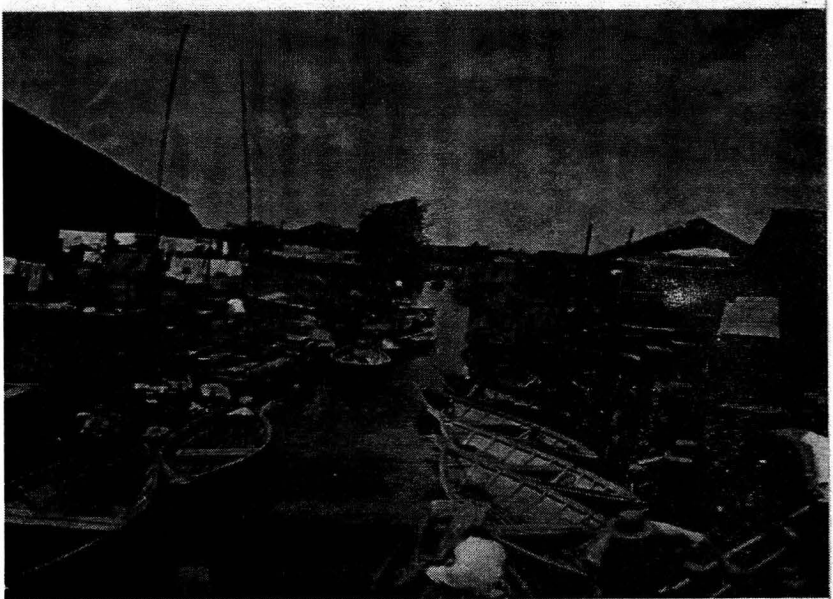
Syarif Abdurrahman mengikuti jejak ayahnya. beliau juga seorang pengembara. Beliau dinikahkan dengan puteri Opu Daeng Manambon yaitu Utin Putri Tjandramidi. Banyak aktivitas pengembaraan yang dilakukannya, seperti

ke Palembang pada tahun 1765, dimana beliau bertemu dengan para pegadang dan penyiur Islam yang berasal dari negeri Arab, serta mengadakan perdagangan dengan mereka. Pada tahun 1767, beliau mengadakan pelayaran dan melakukan perdagangan lada di Banjarmasin. Di wilayah inilah terjadi peperangan dengan kapal-kapal Perancis dan jung-jung Cina dan berhasil memenangkan pertempuran tersebut. di Banjarmasin ini kemudian Syarif Abdurrahman dinikahkan oleh Sultan Saad, Sultan Kerajaan Banjar dengan Ratu Syahranom. Beliau diberi gelar oleh Sultan Kerajaan Banjar dengan gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam. Oleh karena beliau ikut mengatur kerajaan sehingga beliau kurang disenangi oleh kerabat kerajaan, lalu beliau pun memilih kembali ke Mempawah.

Sesampainya di Mempawah pun Syarif Abdurrahman juga kurang disenangi para elite di Mempawah sehingga beliau bersama pengikutnya orang-orang Bugis mengembara meninggalkan Mempawah untuk mencari wilayah pemukiman baru. Sampailah mereka di muara pertemuan antara Sungai Kapuas dengan Sungai Landak. Di situlah basis perompak yang selama ini selalu menakut-nakuti para pedagang yang hilir mudik melalui wilayah itu. Dengan berbekal meriam, lalu ditembakkannya meriam ke arah perompak tersebut dan Syarif Abdurrahman berhasil menaklukkan para perompak itu. Kemudian Abdurrahman bermufakat untuk membuka wilayah yang baru

ditemukannya itu karena menurut pemikirannya wilayah itu sangat strategis dalam berbagai aspek kehidupan seperti kehidupan sosial ekonomi, muara sungai menopang pelayaran dan perdagangan, pertahanan untuk menunjang wilayah ini sebagai pusat kota. Namun wilayahnya masih diselimuti hutan belantara.

Hasil musayawah itu diputuskan untuk membuka hutan pada areal itu dan membuat permukiman baru. Menurut Veth dalam Purwana dkk bahwa pada tanggal 7 Januari 1772, di wilayah inilah Syarif Abdurrahman mendirikan sebuah tempat tinggal yang besar sebagai tempat tinggal mereka yang terbuat dari bahan bangunan sederhana yaitu bambu dan ilalang.



Pemandangan di permukiman penduduk dimana sampan-sampan ditambatkan di depan rumah

Oleh karena pemukiman baru ini merupakan daerah yang strategis, maka daerahnya pun dapat berkembang pesat. Pontianak menjadi daerah persinggahan dan berkumpulnya para pedagang. Pertumbuhan wilayah yang sangat pesat menjadikan Pontianak sebagai jalur perdagangan dan pelayaran bagi para pendatang di seluruh nusantara.

Peristiwa penobatan Syarif Abdurrahman sebagai Sultan dilaksanakan pada tanggal 8 Sya'ban 1192 H dengan pelaksanaan upacara yang dihadiri oleh para sultan dan panembahan dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Penobatan ini dilakukan oleh Yang Dipertuan Haji Raja Muda dari Riau atas nama seluruh rakyat mengangkat Pangeran Syarif Abdurrahman Nuralam yang bergelar Maulana Sultan Syarif Abdurrahman dari Kerajaan Pontianak.

Dengan terbentuknya Kerajaan Pontianak, telah menaik perhatian orang-orang Dayak untuk berdatangan ke negeri ini mengisi perkampungan yang masih kosong yang baru dibuka tersebut. dengan demikian pula berarti bahwa babakan baru dalam sistem pemerintahan kerajaan mulai berlaku.

Pontianak sejak berdiri sebagai sebuah negeri adalah berbentuk kerajaan yang bernuansa Islami. Hal yang berlaku secara umum bahwa di nusantara ini untuk pusat-pusat kerajaan yang berada di sepanjang aliran sungai lebih banyak

dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, karena di sepanjang sungai itulah banyak dilakukan aktivitas perdagangan dan pelayaran serta sebagai tempat persinggahan bagi para pedagang. Melalui perantara mereka para pedagang itulah yang menyebarkan agama Islam. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang dari bangsa Arab dan Gujarat. Walaupun demikian, masing-masing kerajaan menunjukkan ciri-ciri kekuasaan yang berbeda-beda (Purwana, 2004 : 19).

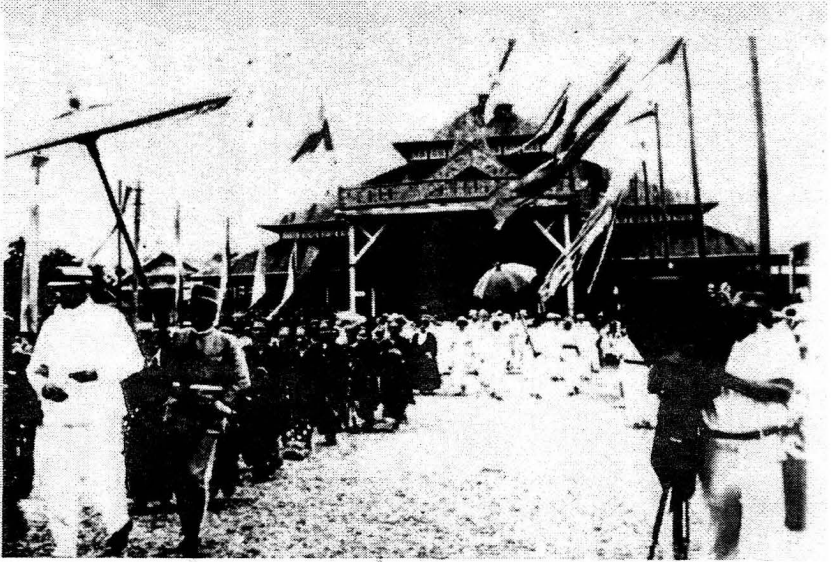


Perahu sebagai alat transportasi di sungai di Pontianak

Dengan telah dinobatkannya Maulana Sultan Syarif Abdurrahman Alkadri sebagai Sultan dari Kerajaan

Pontianak, maka beliau memiliki kekuasaan penuh pada rakyat yang dipimpinnya. Beliau merupakan seorang raja dari keturunan ulama besar, penyiar agama Islam di nusantara ini berasal dari Trim Hadralmaut sebagaimana telah diungkap sebelumnya yaitu Habib Husein Alkadri. Sebagai pemeluk Islam yang taat, Sultan Syarif Abdurrahman mendirikan masjid tepat di pertemuan Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil, di atas sebuah tanah berpasir (*Betting*), (Listiana : 2009 :19).

Sebagai sultan, beliau dibantu oleh para pembesar kerajaan. Konsep kekuasaan Sultan dari Kerajaan Pontianak ini menunjukkan bahwa pribadi Sultan adalah sakral dan penuh kharisma. Otoritasnya bersifat kharismatis yang mendapat legitimasi untuk menjalankan kekuasaan serta kepemimpinannya dalam menduduki tahta kerajaan sehingga skala sistem politik dan format kerajaan sering menjadi faktor penentu dari struktur kekuasaan yang dibangun di dalamnya. (Purwana : 2004 : 20).



Suasana Istana saat Ulang tahun Sultan Pontianak

Pembesar kerajaan ini memiliki peranan penting dalam melaksanakan roda pemerintahan kerajaan, namun penguasa tertinggi adalah sultan itu sendiri. Pembesar-pembesar kerajaan ini diangkat dari keluarga kerajaan itu sendiri.

Adapun susunan birokrasi kerajaan Pontianak terdiri dari :

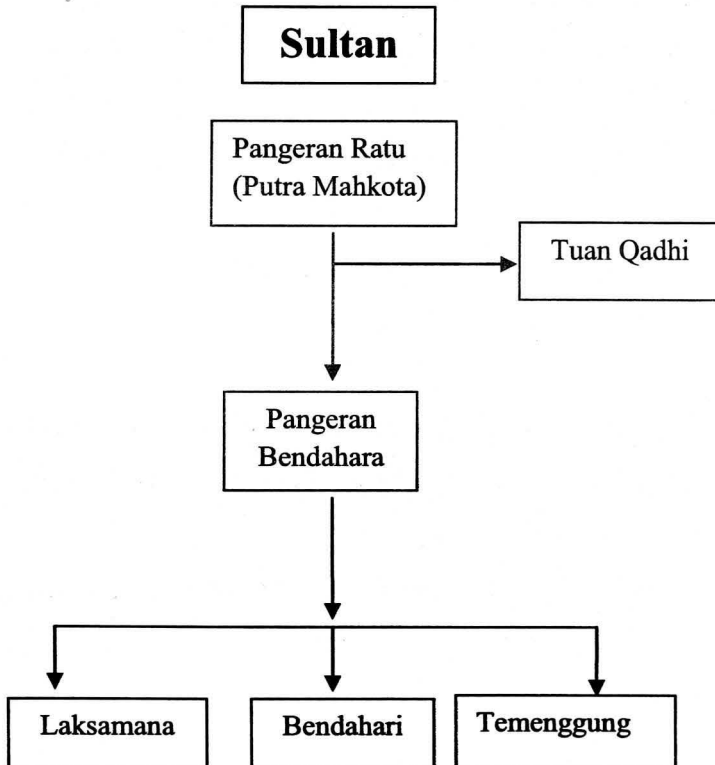
1. Sultan, penguasa tertinggi di kerajaan Pontianak
2. Pangeran Ratu, adalah anak sultan yang menjadi ahli waris kerajaan untuk melanjutkan kekuasaan sultan nantinya;
3. Pangeran Bendahara bertugas membawahi seluruh pembesar kerajaan, memegang jabatan tertinggi pengadilan dan berkuasa atas urusan pajak kerajaan.

4. Pangeran Laksamana adalah Pembantu Pangeran Bendahara yang bertugas mengawal Sultan, menjaga keamanan pantai dan memimpin armada angkatan laut dalam wilayah kerajaan.
5. Tuan Qadhi adalah hakim atau penasehat hukum raja.
6. Bendahari adalah jabatan yang mengurus roda kehidupan perekonomian dan keuangan kerajaan.
7. Temenggung adalah wakil raja yang ada di kampung-kampung.

Struktur pemerintahan kerajaan seperti ini mulai diberlakukan sejak pemerintahan Syarif Kasim (1808 – 1819) dan penggantinya Syarif Kasim.

Apabila dibuat struktur birokrasi pemerintahan, maka dapat disusun sebagai berikut :

Struktur Pemerintahan Kesultanan Pontianak



2.2 Pontianak Masa Penjajahan Belanda

Selama ini pemerintahan Hindia Belanda lebih memfokuskan wilayah kekuasaannya di Pulau Jawa karena akses ke Pulau Jawa lebih mudah dan kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di Pulau Jawa itulah Pemerintah Hindia Belanda memperkuat pertahanannya.

Hegemoni orang-orang Eropa ke Kalimantan dimulai ada awal abad ke – 17 ketika Inggris dan Belanda berusaha untuk memperoleh pijakan bagi kepentingan dagangnya. Belanda muncul di Kalimantan 1598. Pada akhir abad ke-19, setelah selesainya operasi Pasifikasi untuk menciptakan *rust en orde* di Jawa dan sebagian Sumatera, perhatian pemerintah kolonial Belanda mulai melirik kawasan Kalimantan Barat pada pertengahan abad ke-20. Belanda mulai membenahi pemerintahannya dengan membagi wilayah Kalimantan menjadi dua residentie yaitu Borneo West dan Borneo Zuid Oost yang masing-masing dikepalai oleh seorang residen. Wilayah residentie ini dibagi lagi menjadi afdeling yang dipimpin oleh seorang asisten residen dan dipecah lagi dalam beberapa onderafdeling yang dipimpin oleh seorang controlluer dan wilayah distrik yang dipimpin oleh kepala distrik. (ANRI : 3)

Pada dasarnya sistem pemerintahan kota Pontianak antara periode 1771 – 1945, adalah masih dalam bentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintahan Kota Pontianak itu tidak mengalami perubahan namun kedatangan VOC dan Belanda telah mengubah tatanan pemerintahan kerajaan tersebut. hal ini disebabkan karena sebagai salah satu wilayah di kepulauan nusantara ini belum memperoleh kemerdekaan dan pemerintahan kota Pontianak masih di bawah kekuasaan pemerintahan penjajah

pada saat itu, baik pemerintahan Kolonial Belanda maupun pemerintahan pendudukan Jepang. Wilayah kerajaan ini terdiri dari 3 bagian wilayah pemerintahan yaitu pemerintahan tradisional itu sendiri, Kerajaan Pontianak, Pemerintah Hindia Belanda, dan wilayah kekuasaan VOC.

Keberadaan Kota Pontianak seperti sekarang ini merupakan buah karya dari Sultan Syarif Abdurrahman yang membuka wilayah ini dimana dulunya merupakan wilayah hutan belantara yang dihuni oleh para perompak sebagai basis persembunyian mereka.

Berkat pengembaraan Syarif Abdurrahman yang ingin membuka wilayah baru karena orang tuanya yang telah meninggal dan iapun kurang disenangi, maka berlayar bersama pengikutnya untuk membuka wilayah baru dalam rangka mengembangkan kekuasaannya.

Bersama pengikutnya ia berhasil mengusir perompak yang selalu mengganggu para pedagang yang lewat di sekitar wilayah itu menuju Mempawah. Dikatakan pula bahwa wilayah itu adalah wilayah yang strategis untuk melakukan aktivitas baik perdagangan, tempat persinggahan dan pelayaran. Wilayah Kota Pontianak ini dianggapnya sebagai tempat yang strategis sebagai tempat permukiman dan aktivitas lainnya untuk membangun sebuah pemerintahan yang baru yang terlepas dari kerajaan lain yang pernah menjadi tempat tinggal sebelumnya serta perkembangan

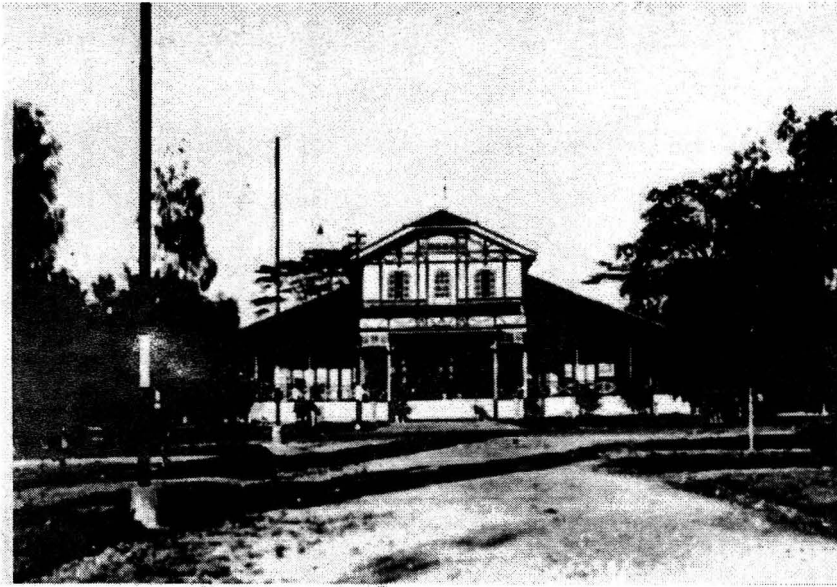
perekonomian untuk kelangsungan kehidupannya beserta keluarga dan para pengikutnya.

Dengan dibukanya wilayah oleh Syarif Abdurrahman semakin membuka peluang orang-orang berdatangan ke wilayah ini dengan berbagai tujuan, ada yang berdagang, persinggahan, menetap dan mencari kehidupan baru di kerajaan ini. Pembentukan kampung pun mulai terjadi pada saat wilayah ini ramai dan pada akhirnya dinobatkan Syarif Abdurrahman sebagai Sultan Pontianak yang dikukuhkan oleh raja-raja dan panembahan yang ada di wilayah nusantara ini atas nama rakyat Pontianak tahun 1771. Pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman berlangsung dari tahun 1771 - 1808.

Dengan dinobatkannya Sultan Syarif Abdurrahman, yang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan urusan pemerintahan, perdagangan dan pelayaran. Berkat dukungan keluarga dan para pengikutnya ia berupaya untuk membangun negeri ini. Dengan kebijakannya di berbagai aspek kehidupan dan strategi untuk membangun sebuah negeri yang cakap agar tercipta kedamaian, keamanan dan kesejahteraan yang baik, maka ia membebaskan para pedagang dan para pelintas wilayahnya untuk beraktivitas, namun jika kehadiran mereka dibutuhkan oleh sultan untuk kepentingan keamanan negeri Pontianak, maka mereka kaum pendatang tersebut harus ikut bersedia membantunya.

Penataan-penataan perkampungan mulai ditata demi kepentingan pertahanan dan keamanan keluarga sultan. Pembangunan berbagai permukiman dilakukan secara bertahap. Bahan bangunan diperolehnya baik itu dari hasil perluasan pengaruh kekuasaan di Kerajaan Sanggau antara tahun 1779 - 1780 dengan menyempurnakan pembangunan pagar seluas bangunan istana dengan kayu belian bekas benteng Keraton Sanggau yang berhasil diambil oleh pasukan Sultan Syarif Abdurrahman pada penyerangannya yang kedua. (Veth dalam Listiana, 2009 : 19).

Secara bertahap pembangunan itu terus dilakukan dan sepeninggalnya Sultan Syarif Abdurrahman, maka tampuk pemerintah kerajaan dilanjutkan oleh putera sulungnya Syarif Kasim. Dalam pemerintah Syarif Kasim (1808 – 1819) ini, kembali melanjutkan pembangunan khususnya perdagangan untuk memperkuat perekonomian di negeri ini dan menggandeng Inggris sebagai penguasa di nusantara pada saat itu. Penataan perkampungan menjadi sebuah struktur kota sultan tampak dilanjutkan pada masa pemerintahan Syarif Kasim dengan pembenahan istana, masjid, dan perkampungan-perkampungan penduduk yang semakin ramai karena Pontianak merupakan daerah persinggahan kaum pendatang yang ingin mengadu nasib ke wilayah ini. pada masa kedua sultan inilah struktur sebuah kota kesultanan tampak terbangun. (Listiana, 2009 : 19).



Rumah Residen Pontianak

Pontianak semakin berkembang dengan majunya perdagangan dan persinggahan kaum pendatang di negeri ini, namun kekacauan terjadi di masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim lalu ia meminta bantuan Inggris yang pada saat itu Hindia Belanda melimpahkan kekuasaannya pada Inggris. Kemudian diangkatlah Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di berbagai bekas wilayah koloni Belanda yang berkedudukan di Batavia. Lalu Syarif Kasim meminta bantuan kepada Raffles dan dikirimlah Kapitan Smith sebagai pejabat EIC (*East India Company*) beserta pasukannya ke Pontianak.

Kemudian pada tahun 1816, kembali kekuasaan atas Pontianak dipegang oleh Belanda, maka sultan pun meminta mengirim utusan untuk melakukan kerja sama dengan Belanda dan pada tahun 1818. Sejak itu campur tangan pihak Belanda begitu besar dalam pelaksanaan roda pemerintahan kerajaan, apalagi pada saat pergantian tahta kerajaan yang seringkali terjadi pergolakan. Situasi dan kondisi seperti ini selalu dimanfaatkan pemerintah Hindia Belanda untuk semakin menguatkan kekuasaan politiknya atas Pontianak.

Kemudian pergantian tahta kerajaan Pontianak diberikan kepada Sy. Usman bin Sy. Abdurrahman, lalu Sy. Abubakar sebagai putera sulung Sy. Kasim berkeberatan dan mengadukan permasalahannya kepada pihak pemerintah Belanda di Batavia, tetapi Belanda tetap mengangkat Sy. Usman bin Sy. Abdurrahman sebagai sultan yang memerintah antara tahun 1819 – 1855, sedangkan Sy. Abubakar sebagai Pangeran Muda dengan mendapatkan tunjangan sebesar f6.000 setiap tahun dari sultan. (Purwana dkk, 2004 : 38)

Ketika Sy. Usman wafat maka tahta kerajaan digantikan oleh Sy. Hamid Alkadri. Sy. Hamid Alkadri ini memerintah dari tahun 1855 – 1872. Selain Pontianak, Mempawah juga masuk dalam wilayah kekuasaannya. Semua urusan kepolisian, tunjangan untuk kaum kerabat sultan, hal yang berkenaan dengan peradilan menjadi tanggung jawab sultan. Kemudian tahta kerajaan diperluas hingga Mandor.

Selanjutnya tampuk kekuasaan kerajaan Pontianak dipegang oleh Sy. Yusuf Alkadri yang memerintah dari tahun 1872 – 1895. Pada masa pemerintahan Syarif Yusuf ini menjalin hubungan yang luas dengan raja-raja di nusantara dengan mengadakan kerja sama untuk menarik perhatian para pedagang untuk kembali beraktivitas di kawasan Pontianak. Oleh karena itu pedagang berdatangan ke Pontianak seperti dari Bugis, Tambelan, Banjar, Serasan, Sampit, Bangka Belitung, Kuantan, Kamboja, Saigon dan Bansir. Kedatangan mereka memberikan nuansa pada perkembangan Kota Pontianak. Mereka diberi Sultan tempat untuk mendirikan perkampungan di tepian Sungai Kapuas. Selain itu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Yusuf ini pula ditentukannya tapal batas antara Kerajaan Pontianak dengan Panembahan Landak.

Selanjutnya setelah pemerintahan Sultan Syarif Yusuf, tampuk pemerintahan diserahkan kepada Sy. Muhammad Alkadri sejak tahun 1895. Pada masa pemerintahannya, ia telah berhasil meningkatkan komoditi pertanian, hutan, dan perdagangan. Atas jasanya yang telah berhasil meningkatkan perekonomian, maka ia diangkat sebagai *officer in de orde van oranje Nassau* berbintang perak.

2.3 Pontianak Masa Pendudukan Jepang

Kedatangan Jepang di Kalimantan Barat dan khususnya Pontianak, mulai berkuasa pada tanggal 2 Pebruari 1942. Sebelumnya aksi militer Jepang dengan melakukan pengeboman di Kota Pontianak seperti di kawasan Parit Besar, Kampung Bali, kawasan gereja Katholik dan Kampung Melayu. Penyerbuan ini dilakukan pada 19 Desember 1941.

Peristiwa ini menimbulkan rasa yang sangat mencekam bagi rakyat Pontianak pada masa itu. Akibatnya Rumah Sakit Umum tidak dapat menampung semua korban dari pemboman Jepang tersebut.

Melihat situasi dan kondisi Kota Pontianak seperti itu, maka pemerintah Hindia Belanda menawarkan kepada Sultan Syarif Muhammad untuk melarikan diri bersama Angkatan Perang Hindia Belanda pada ekspedisi tentara Jepang yang berlangsung di Kalijati, Jawa Barat.

Sistem pemerintahan sipil Syarif Muhammad disebutnya dengan istilah Doo – Koo dan kepala swapraja hanyalah penguasa yang dibatasi wewenang kekuasaannya. Memang pada saat pemerintahan Militer *Rikugun* (Angkatan Darat Jepang), perekonomian mulai dirasakan rakyat Pontianak membaik dan kehidupan mulai tenang, tetapi pada saat serah terima kekuasaan dari Rikugun ke Kaigun (Angkatan Laut Jepang), membawa dampak yang besar pada perekonomian Kota Pontianak. Perekonomian ekonomi

Kota Pontianak mulai menurun, rakyat kekurangan makanan pokok dan rakyat mengalami kesengsaraan dan kemelaratan. Hal ini disebabkan karena aktivitas pelayaran terhenti karena seringnya terjadi penyerangan melalui pesawat terbang di kawasan Pontianak.

Dengan kejadian seperti ini menjadikan Pontianak kawasan terisolir, sehingga bahan makanan pokok sangat langka dijumpai penduduk. Hubungan dengan masyarakat pedalaman terjadi dengan perahu motor untuk menukarkan makanan pun hanya terkadang untuk keperluan militer Jepang.

Dengan demikian aktivitas pelabuhan Pontianak yang semula ramai pada saat pemerintahan Hindia Belanda, pada saat ini mengalami penurunan yang tajam.



Perubahan Sistem Pemerintahan

Pada dasarnya sistem pemerintahan kota Pontianak antara periode 1771 – 1945, pada dasarnya adalah masih dalam bentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Sistem pemerintahannya masih bersifat tradisional. Kekuasaan raja bersifat sakral, raja adalah seorang tokoh yang diagungkan oleh rakyatnya. Ia memimpin bersifat kharismatik.

Awal berdirinya kerajaan Pontianak, wilayah nusantara ini sudah berada dalam kekuasaan penjajah Belanda. VOC sudah berdiri di Pontianak ini sejak masa pemerintahan sultan pertama. Pada dasarnya pemerintah kerajaan Pontianak sekalipun memiliki wilayah kekuasaan sendiri namun sejak kedatangan VOC di Kalimantan Barat sudah terjadi pada masa sultan Pontianak yang pertama yaitu Sultan Syarif Abdurrahman. Pertama kali kedatangan VOC itu atas keluhan Kerajaan Landak atas sikap Sultan Syarif

Abdurrahman yang mengancam eksistensi kerajaan Landak tersebut, yang kehadirannya diwakili oleh Nicholas De Kloek. Pada saat kedatangan VOC yang kedua kalinya diwakili oleh Willem Adriaan Palm. Hasil pertemuannya dengan sultan menghasilkan sebuah kontrak perjanjian peneguhan kekuasaan (*acte van Investiture*) pada 5 Juli 1779, yang isinya bahwa VOC mendapatkan sebidang tanah seluas 1000 pal yang disebut dengan *duizend vierkanten paal* atau tanah seribu. (Rahman dalam Listiana, 2009 : 23) .

Dengan demikian, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Pontianak ini terbagi atas 3 (tiga) pemerintahan yaitu pemerintahan kerajaan yang bersifat tradisional, pemerintahan Hindia Belanda yang merupakan pemerintahan kolonial dan pemerintahan kapitalis yang merupakan kekuasaan VOC yang juga memiliki kekuasaan atas Pontianak.

Setelah VOC ditutup maka Belanda mewarisi aset yang dimiliki VOC tersebut. Belanda mulai menguatkan sistem politiknya di Pontianak. Sultan hanyalah sebagai boneka mereka untuk menguatkan keberadaannya di negeri ini. Pihak Hindia Belanda selalu mengadakan perjanjian atau kontrak yang bersifat menguntungkan dan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda itu sendiri.

Sebagai akibat dari perjanjian atau kontrak yang telah dibuat oleh pihak pemerintah Hindia Belanda yang akhirnya mendapat perlawanan atau tidak diindahkannya peraturan

tersebut oleh pihak kerajaan, maka mereka memperbaharui kembali peraturan-peraturan yang mengikat sultan.

Pada saat pemerintah Hindia Belanda mengalami krisis keuangan lalu mereka merampingkan struktur pemerintahannya

Sultan sebagai pemilik wilayah secara administratif tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan arah dan kebijakan dalam menentukan sistem pemerintahannya sendiri atau wilayah kerajaan bersifat tradisional itu. Mereka harus takluk pada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah kolonial tersebut.

Pontianak sebagai afdeling membawahi negeri seperti Pontianak, Mempawah, Landak, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sipau, Blitang, Sintang, Silat, Suhait, Selimbau, Piasa, Jungkung, Bunut, Malo, Sibau, Taman, Madai, Kayan, Melawai, Matan, Simpang, Sukadana dan Kubu.

Dalam sistem administratifnya, wilayah afdeling Pontianak ini dipimpin oleh asisten residen dengan dibantu oleh 4 (empat) orang *gezaghapper* di antaranya 3 (tiga) orang pribumi dan satu orang pejabat Belanda. Hingga akhir 1848, belum terdapat pemerintahan Hindia Belanda terpusat di wilayah Kalimantan, yang ada hanya residen dan asisten residen. Jabatan tertinggi masih dipegang oleh pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Batavia.

Era pergerakan nasional terjadi antara tahun 1900 – 1942, di awal abad 20, merupakan awal perkembangan ekonomi dan perluasan jabatan pemerintahan Belanda. Pihak Hindia Belanda mulai memikirkan tingkat keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia yang telah dijajahnya itu. Perubahan kebijakan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, namun demikian sudah memberikan kebebasan untuk mendirikan organisasi pergerakan baik berskala lokal maupun nasional. Dalam masa inilah merupakan awal perkembangan ekonomi yang pesat bagi pihak Belanda dan kehidupan perekonomiannya pun bangkit kembali dan Belanda mulai memperhatikan kesejahteraan dan tingkat kemajuan pendidikan sebagai pertanggungjawaban moral bagi rakyat atau penduduk pribumi yang ada di wilayah jajahannya.

Kebijakan politik pemerintahan Belanda terkenal dengan sistem sentralisasi yang kaku. Segala urusan harus ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat yang ada di Batavia. Oleh karena itu di awal abad ke - 20 pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk menyerahkan pembinaan urusan dan kepentingan lokal kepada badan-badan pemerintah untuk mengelola keuangan dan diberikan kebebasan sendiri.

Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem desentralisasi atau *Decentralisatie Wet*. Walaupun demikian tidak memberikan pengaruh yang berarti pada kehidupan

kerajaan Pontianak karena sultan masih terikat dengan pemerintah Hindia Belanda melalui penandatanganan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian oleh sultan sebelumnya.

Dengan diterbitkannya *staatsblad* 1919 no. 512, maka dibentuklah *districts-bestuur* baru. *Afdeling* Pontianak membawahi *onderafdeling* Pontianak, Landak, Sanggau dan Sekadau. Mengingat beragamnya pekerjaan lokal akibat dari sistem desentralisasi sehingga perlu dilakukan reorganisasi sistem pemerintahan dan diwujudkan pada tahun 1922 dengan diterbitkannya undang-undang Bestuur Hervorming Wet (*staatsblad* 1922 no 216, yang berisi tentang undang-undang bestuur hervorming wet yaitu melakukan pengaturan dan pembaharuan kembali sistem pemerintahan yang ada. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaan otonomi berdasarkan undang-undang lalu pemerintah Hindia Belanda melakukan pembagian dalam bidang pemerintahan yaitu administratif, kenegaraan dan organik. Kemudian dari pada itu maka dibentuklah wilayah administratif Pemerintahan Kalimantan (*Gouvernementen Borneo*) sebagai wilayah administratif yang dikepalai oleh seorang gubernur.

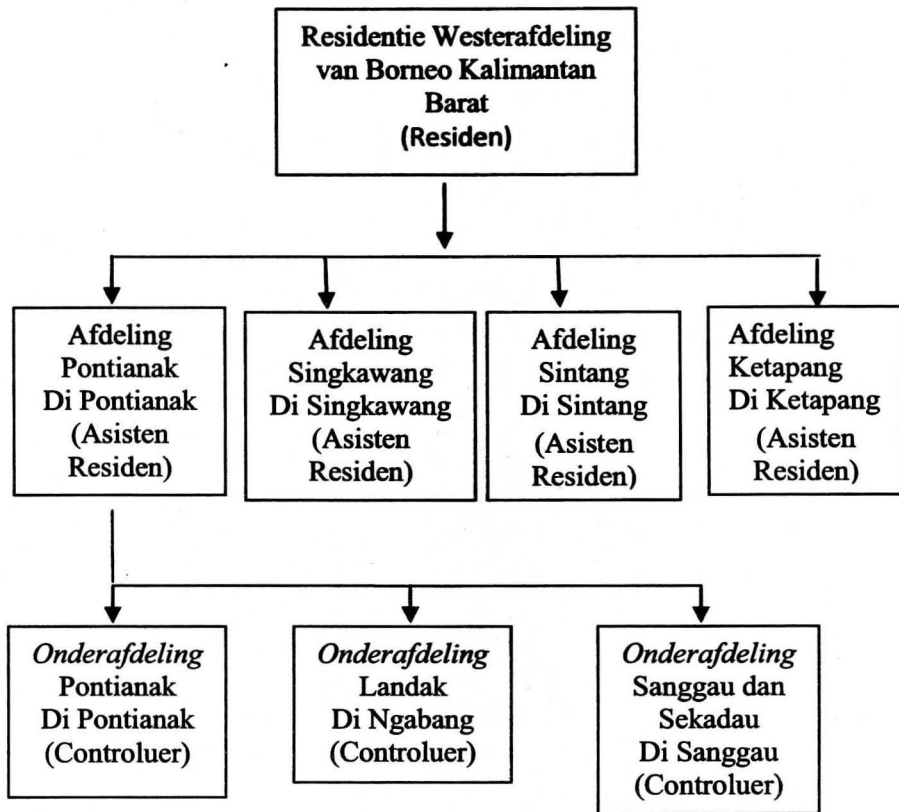
Dua tahun kemudian Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stashouwer mengeluarkan keputusan pada 24 Juni 1938 yang mengatur ibukota wilayah

administratif pemerintahan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

Kemudian dengan diterbitkannya *gouvernementbesluit* 30 Juni 1938 No. 21 yang mengatur tentang kedudukan residen sebagai kepala pemerintahan karesidenan sekaligus kepala kepolisian dan bertanggung jawab langsung di bawah Gubernur Borneo. Residen berkewajiban memelihara kekuasaan, keamanan, dan ketertiban serta mengusahakan perlindungan keselamatan dan benda. Apabila residen sedang berhalangan atau tidak ada maka yang berhak mewakilinya adalah asisten residen Pontianak.

Keesokan harinya Kota Pontianak ditetapkan sebagai Ibukota *Residentie Westerafdeling van Borneo* (Kalimantan Barat) dan wilayahnya dibagi dalam empat yaitu afdeling yaitu afdeling Pontianak, Singkawang dengan Ibukotanya Singkawang, Afdeling Sintang dengan ibukota Sintang dan Afdeling Ketapang dengan ibukota Ketapang. Masing-masing afdeling dikepalai oleh seorang asisten residen, dan untuk afdeling Pontianak sendiri dibagi menjadi tiga onderafdeling yaitu Onderafdeling Pontianak berkedudukan di Pontianak, Landak di Ngabang serta Sanggau dan Sekadau di Sanggau.

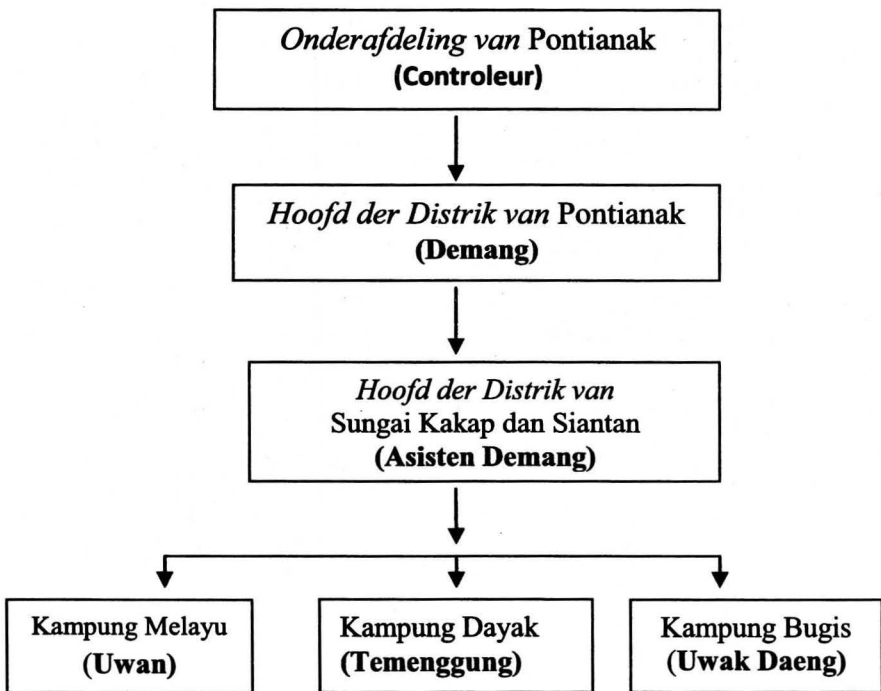
Struktur pembagian wilayah Residentie Westerafdeling van Borneo adalah sebagai berikut :



Pemerintahan *Onderafdeling* Pontianak di bawah kekuasaan *controleur*, sekaligus memegang kekuasaan *Hoofd* (*Plaatselijke Bestuur van Pontianak*, di bawah *Onderafdeling* Pontianak terdapat struktur pemerintahan yang disebut dengan *Hoofd der Distrik van Pontianak* dijabat oleh seorang demang, kemudian di bawahnya lagi terdapat struktur pemerintahan yang disebut dengan *Hoofd der Onderdistrik van Siantan dan Sungai Kakap* dijabat oleh Asisten Demang, dan tingkat yang paling bawah adalah

kampung yang dipegang oleh uwan untuk kampung yang dihuni oleh suku Melayu, uwak daeng bagi suku Bugis dan temenggung bagi Suku Dayak.

Adapun *Onderafdeling* Pontianak dapat dipetakan dengan struktur atau bagan sebagai berikut :



Dalam struktur kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Pontianak baik kepada distrik maupun onderdistrik Pontianak biasanya dijabat oleh penguasa tradisional, sehingga masih penuh dengan otoritas. Mereka merupakan tulang punggung birokrasi bagi pelaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, lalu modernisasi birokrasi

terbatas pada masalah-masalah yang berkaitan dengan adminitrasif saja. Kecenderungan ini terjadi pada demang, walaupun diangkat oleh sultan tetapi harus sepengetahuan residen sebagai penasehat kerajaan Pontianak, sehingga demang berfungsi sebagai pejabat Belanda dan menjadi penghubung antara residen, sultan dan pribumi.

Adapun struktur kekuasaan dalam sistem politik pemerintahan Hindia Belanda masih menerapkan birokrasi dengan sistem yang bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari hirarki yang ketat yang menjadi penyalur perintah dari atas ke bawah. Sedangkan kedudukan sultan pada tampuk pimpinan pribumi masih tetap memerintah di kerajaannya namun tetap didampingi oleh residen dan asisten residen sebagai penasehat Sultan Pontianak dan wakil dari pihak pemerintahan Hindia Belanda. (Purwana, 2004 : 90-92)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan terpusat di Batavia jadi pemerintahannya bersifat sentralistik.

Memang, sekalipun sistem pemerintahan Pontianak itu sebagai sebuah Kerajaan, tetapi kekuasaan raja tidak mutlak karena raja dan kerabat istana harus patuh dan tunduk akan segala aturan atau perjanjian yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang pun masih menganut sistem pemerintahan Kolonial Belanda karena diharapkan tidak terjadi kekosongan pemerintahan setelah penyerahan

kedaulatan, mereka masih menggunakan bekas pegawai pemerintah Hindia Belanda untuk memudahkan pelaksanaan roda pemerintahan agar tidak terjadi kekacauan.

Sistem pemerintah di Kota Pontianak pada masa pemerintahan Jepang dikuasai oleh Angkatan Laut namun sementara ini angkatan darat Jepang yang masih menduduki Kota Pontianak



4.1 Kesimpulan

Kota Pontianak sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Barat sudah dikenal sejak masa pemerintahan Kerajaan. Cikal bakal pemerintahan Kota Pontianak adalah dengan ditemukan kawasan kosong tempat persembunyian kaum perompak yang selalu mengganggu keamanan para pedagang yang melintasi wilayah ini untuk mengadakan aktivitas perdagangan.

Kawasan ini merupakan kawasan kosong yang tidak berpenghuni. Pada saat Syarif Abdurrahman ingin mencari tempat atau pemukiman baru untuk ia bersama keluarga dan para pengikutnya mendirikan sebuah negeri untuk kelangsungan kehidupan mereka selanjutnya. Oleh karena itu keinginan kuat diwujudkannya dengan melakukan pencarian lokasi untuk mendirikan sebuah negeri yang dilatarbelakangi dengan kepiawaian dan pengalamannya

dalam berlayar mengarungi nusantara ini menyebabkan ia bertekad untuk berlayar menelusuri sungai hingga sampai di pertigaan sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di sanalah tempat bersarang perompak-perompak yang selama ini mengganggu para pedagang yang hilir mudik melalui sungai tersebut.

Dengan berhasil ditemukannya wilayah yang merupakan sarang perompak dan iapun beserta dengan para pengikutnya berhasil mengusir para perompak maka tak lama kemudian wilayah itu dibersihkannya kemudian dengan dibantu para pengikut dan masyarakat Dayak, ia membuka hutan belantara untuk mendirikan sebuah negeri. Dengan dibukanya wilayah ini pada tahun 1771, maka pada tahun itu pula ditetapkan sebagai tahun berdirinya Kota Pontianak.

Awal mula berdiri Kota Pontianak merupakan sebuah Kerajaan yang juga di bawah kekuasaan pemerintahan Kolonial Belanda pada masa itu, di bawah kekuasaan VOC dengan hadiah pemberian tanah seribu dari Sultan kepada VOC, namun kekuasaan VOC itu akhirnya diserahkan ke Belanda karena VOC mengalami kebangkrutan. Dengan demikian kekuasaan Belanda semakin kuat di wilayah nusantara ini.

Sekalipun silih bergantinya sultan namun campur tangan pihak pemerintah Kolonial lebih besar sehingga raja yang memimpin Pontianak pada masa itu tidak memiliki kekuasaan yang besar untuk menjalankan roda

pemerintahannya. Raja memiliki kekuasaan atas pemerintahan tradisional saja.

Kekuasaan kesultanan Pontianak ini diikat dengan perjanjian-perjanjian yang lebih menguntungkan pihak penjajah Belanda. Demikian juga dengan Pendudukan Militer Jepang pada saat itu. Berbagai penderitaan dan penganiyaan yang dilakukan pihak militer Jepang menambah kesengsaraan rakyat Pontianak pada masa itu dengan dilakukannya pengeboman di berbagai tempat sekitar kota di Kerajaan Pontianak. Suasana yang semakin menakutkan itu membuat rakyat semakin menderita dan puncaknya adalah dilakukannya pembunuhan secara massal sultan-sultan yang ada di Kalimantan Barat dan kaum cendekiawan, tokoh agama yang ada di negeri ini. Pada masa pemerintahan Jepang ini kehidupan rakyat Pontianak secara khusus dan umumnya Kalimantan Barat mengalami penderitaan yang sangat menyengsarakan.

4.2 Saran

Dengan adanya penulisan seperti ini setidaknya memberikan gambaran kepada para pembaca tentang sejarah Kota Pontianak di masa kerajaan hingga pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Barat secara umum dan khususnya di Pontianak, mengingat sudah banyak dilakukan kajian sejarah tentang Kota Pontianak, namun buku yang ditulis secara partial tentang Kota Pontianak dengan sub

bahasan yang berbeda-beda, maka buku ini difokuskan pada sistem pemerintahan Kota Pontianak yang dapat memberikan informasi dan gambaran sistem pemerintahan Kota Pontianak saat itu.

Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para guru untuk memperkenalkan sejarah Kota Pontianak agar generasi muda mengetahui sejarah kotanya sendiri di samping harus mengenalkan mereka sejarah nasional. Selama ini mereka sudah banyak mengetahui tentang sejarah nasional, oleh karena itu untuk melengkapi pengetahuan para siswa dengan sejarah lokal maka hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di sekolah-sekolah.

Daftar Pustaka

Anonim, *Citra Kalimantan Barat dalam Arsip* , Arsip Nasional Republik Indonesia.

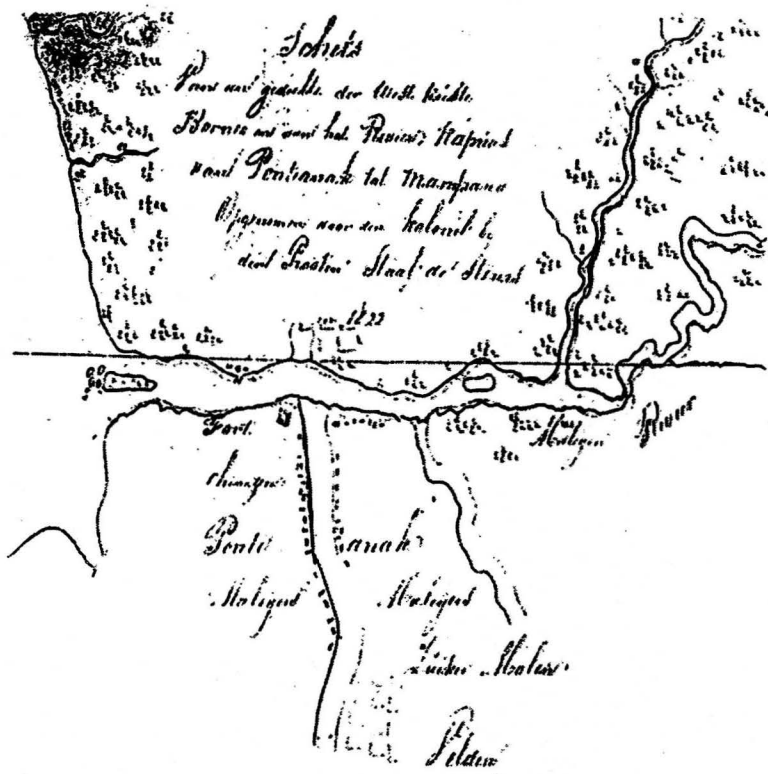
Hariyono,Drs. M.Pd, 1995, *Mempelajari Sejarah secara Efektif*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta

Hidayat, Muhammad, Ir, *Kesultanan Pontianak, Kumpulan Tulisan dalam Istana-Istana di Kalimantan Barat*, Pontianak.

Kuntowijoyo, 2003, *Metodologi Penelitian*, Edisi Kedua, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Lontaan, J.U. 1975, *Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pontianak : Pemda Tingkat I Kalimantan Barat

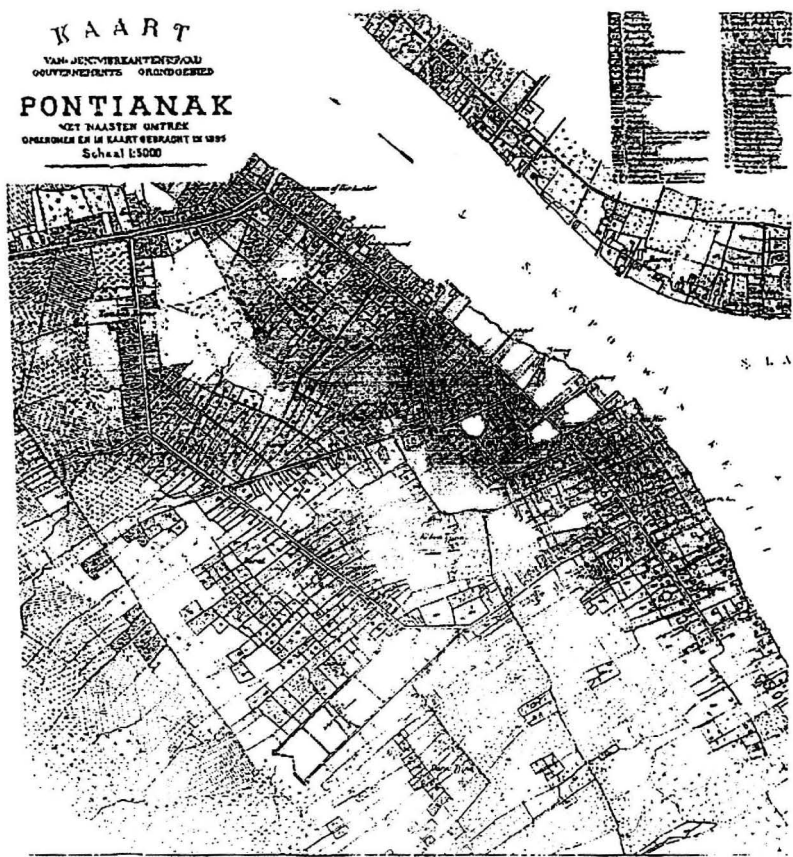
- Listiana, Dana, 2009, *Ibukota Pontianak 1779 – 1942 Labir dan Berkembangnya Sebuah Kota Kolonial*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Pelestarian Sejarah Wilayah Kalimantan, Pontianak
- Mooridjan, M.J, 2010, *Singkawang Liku-liku Perjalanan Menuju ke : Sebuah Pemerintahan Kota*, Pemerintahan Kota Singkawang.
- Musa,Jauhari, drs, dkk, 1999. *Pontianak (Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi)*, Laporan penelitian, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pontianak
- Nugroho Notosusanto, 1978, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*, Yayasan Idayu- Jakarta
- Nurchayani, Lisyawati, dan kawan-kawan, 1999, *Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra*, Proyek Inventraisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Purba, Juniar, dkk. 2011, *Sejarah Penyebaran dan Pengaruh Budaya Melayu di Kalimantan*, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian dan Kebudayaan dan Pariwisata
- Supangat, Eddy, 2007, *Salatiga, Sketsa Kota Lama*, Griya Media, Salatiga.



Peta 2.1 Sketsa Peta Pemukiman Tanah Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Pontianak Tahun 1822, menunjukan keberadaan Kampung Cina sebagai cikal bakal Pasar Pontianak
(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

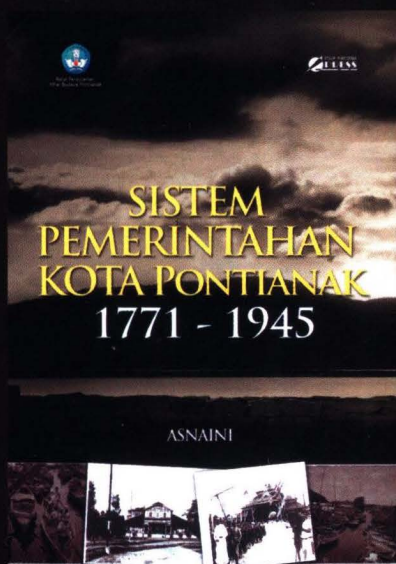
[illegible]

59



Peta 2.3 Wilayah Tanah Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Pontianak Tahun

SISTEM PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK 1771 - 1945



Diterbitkan Atas Kerjasama:



STAIN Pontianak Press
(Anggota IKAPI)
Alamat: Jl. Letjend Soeprapto No. 19
Pontianak Telp./Fax: (0561) 734170



ISBN 978-602-1202-52-4



9 786021 120252 4

Perpustakaan
Jenderal